

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dalam PSAP 01, Laporan Keuangan yaitu, Laporan terstruktur terkait posisi keuangan beserta transaksi-transaksi dimana dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2009 mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berisi salah satunya yaitu tujuan laporan keuangan yang berguna untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan suatu perusahaan, kinerja dan perubahan posisi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh pengguna.

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berkualitas yaitu laporan keuangan dengan karakteristik relevan, andal atau reliabel, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Yang dimaksud dari relevan adalah informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan bisa berpengaruh atas pengambilan putusan pemakai atas cara pendukung pengevaluasian kejadian masa lampau atau kejadian saat ini serta memprediksi masa depan. Andal atau reliabel, yaitu laporan keuangan berisikan informasi yang tidak salah secara material, dapat menyatakan semua fakta dan bisa terverifikasi. Laporan keuangan yang berkualitas juga bisa menjadi perbandingan atas laporan keuangan di tahun sebelumnya ataupun pembanding atas laporan keuangan entitas lain. Kemudian yang terakhir adalah dapat dipahami, yang dimaksud dengan dapat dipahami adalah laporan keuangan tersebut dapat dimengerti pemanfaatan serta dapat dinyatakan pada istilah yang telah tersesuaikan atas batas pengetahuan penggunanya.

Faktor fundamental yang berpengaruh dalam kualitas suatu laporan keuangan pemerintah yaitu dari penerapan sistem akuntansi yang disesuaikan dari sebuah standar akuntansi pemerintahan daerah dan tujuannya adalah untuk akuntabilitas yang meningkat serta keandalan atau reliabilitas pengelolaan keuangan dari pemerintah yang meningkat pula dengan mengembangkan standar

akuntansi pemerintahan. Salah satu implementasi dari standar akuntansi pada pembuatan laporan keuangan daerah yaitu sistem akuntansi (Fauziyah, 2019). PP No. 12 Tahun 2019 yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, SAKD adalah proses prosedur dimulai atas proses pengumpulan data, pencatatan, penarikan kesimpulan sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang bisa diselesaikan secara manual atau dengan menggunakan aplikasi pada komputer. Kehadiran sistem akuntansi memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi dalam memutuskan kualitas dari informasi yang ada pada laporan keuangan (Apandi, 2006).

Laporan keuangan adalah hasil yang harus didapat oleh aspek akuntansi. Sehingga, diperlukan SDM dengan keahlian di bidang akuntansi dalam menerbitkan suatu laporan keuangan yang berkualitas. Kompetensi menggambarkan ciri-ciri atas seseorang yang bisa teramati atas ilmu, kapasitas, dan kecakapannya dalam merampungkan tugas yang telah diberikan (Kiranayanti, 2016).

Untuk melahirkan sebuah informasi yang berkualitas ada dua komponen primer yaitu, informasi yang dibuat dan sumber daya yang membuatnya (Ardianto, 2019). Akan tetapi sudah menjadi persoalan yang sangat awam di sebuah instansi pemerintah daerah bahwa sering kali terdapat penyusunan aparatur daerah yang tidak serasi dengan keperluan baik secara jumlah maupun mutu dari yang dibutuhkan. Dari aspek mutu, penataan aparatur ini tidak berdasarkan apa yang ada pada prinsip yaitu "*the right man on the right place*" (Satibi, 2019). Keadaan tersebut berhubungan terkait kemajuan dari organisasi dengan hanya memperhitungkan wewenang sedangkan mutu dari sumber daya aparturnya belum mencapai *standard* dengan sifat yang semestinya terpenuhi (Erni et al., 2018).

Mengenai kapabilitas dari SDM dalam membentuk informasi atau mengaplikasikan sistem tersebut, mereka diwajibkan mempunyai keahlian di bidang akuntansi dan mempunyai niat belajar atau melatih kapabilitas mereka dalam bidang akuntansi. Dikarekanakan tidak kompetennya SDM dan tugas

yang tidak dituntaskan dengan efisien, efektif, dan ekonomis, hal ini membuat inefisiensi waktu serta tenaga dari informasi yang diwujudkan (Wati et al., 2014). Sehingga, terdapat SDM dengan kompetensi dalam bidang akuntansi menjadikan laporan keuangan bisa diselesaikan secara lengkap di waktu yang pasti. Jika laporan keuangan diselesaikan lebih cepat, lebih efektif pula pengambilan keputusannya (Ardianto, 2019).

BPK Jatim menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kota Surabaya telah 8 kali berturut-turut menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD pada Tahun Anggaran 2011 sampai Tahun Anggaran 2019. Pemberian pendapat Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK adalah paparan profesional pemeriksa tentang “kewajaran” pembuatan laporan keuangan serta bukanlah “jaminan” bahwa pembuatan laporan keuangan oleh pemerintah telah bebas dari fraud atau perbuatan curang lainnya. Pada pemeriksaan BPK terkait LKPD Tahun Anggaran 2019 Kota Surabaya, masih ditemukan sejumlah kelemahan dalam hal penanganan serta tidak mengikuti peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, penyajian LKPD tidak dipengaruhi oleh persoalan tersebut. Peristiwa ini menggerakkan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai kualitas LKPD Kota Surabaya yang terpengaruh penerapan SAKD dan kompetensi SDM.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian terkait hal ini pernah dilaksanakan Komarasari (2016). Menurut beliau, keterandalan LKPD tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kemampuan atau kompetensi dari SDM yang ada.

Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Ardianto (2019). Menurut Ardianto SAKD berdampak negatif pada kualitas dari laporan keuangan daerah sebaliknya kompetensi dari SDM berpengaruh positif terhadap kualitas dari laporan keuangan. Sementara itu penelitian Erni (2018) mengatakan bahwa implementasi dari sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi SDM memberikan pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian Fauziyah (2019). Hasil yang ditunjukkan yaitu

penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi aparatur pemerintah, serta pendayagunaan dari teknologi informasi akan berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Sementara itu, sistem terkait pengendalian secara internal tidak mampu meninjau dampak dari implementasi teknologi informasi pada nilai dari laporan keuangan.

Dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, terlihat bahwa hasil penelitian tidak konsisten, sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh penerapan SAKD terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh dari kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Pendekatan dipilih pada penelitian saat ini yaitu kuantitatif eksplanatori. Jumlah sampel pada penelitian disini yaitu 110 orang pegawai pada 27 Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya. Penulis memanfaatkan data primer yang dikumpulkan dari angket yang sudah dibagikan secara langsung ke 135 pegawai di 27 Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya tahun 2021. Perolehan data selanjutnya dianalisis memakai *software* SPSS 25. Penulis melakukan analisis dengan teknik analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linier berganda. Sedangkan untuk uji hipotesis memakai uji statistik t, uji statistik F, dan uji koefisien determinasi.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Dari hasil yang diperoleh atas penelitian kali saat ini memaparkan bahwa penerapan SAKD dan kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

1.6 Kontribusi Riset

Kontribusi riset adalah manfaat yang didapat dari penelitian. Kontribusi yang akan dibahas adalah kontribusi teoritis yang menjelaskan fenomena dengan teori yang sudah ada dan juga kontribusi praktis, yakni mengoreksi praktek yang telah terjadi menjadi lebih baik.

1.6.1 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini mendukung *Teori Stewardship*. Keterkaitan antara *Teori Stewardship* dan penelitian ini adalah bisa digunakan untuk berbuat sesuai kepentingan umum melalui pelaksanaan tugas dan fungsi secara tepat, menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang diberikan kepadanya, oleh karenanya tujuan ekonomi pemerintahan, layanan umum untuk kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan tanggung jawab itu membutuhkan *steward* atau pembuat laporan keuangan yang mampu memberikan seluruh kemampuan dan keahlian yang dimiliki untuk menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas dan mutu yang sesuai standar. Harapan dari penelitian adalah dapat menyampaikan wawasan yang berguna untuk penelitian ke depannya serta bisa mendukung atau mengkritisi penelitian yang berfokus untuk menerapkan SAKD, kompetensi SDM, dan mutu dari laporan keuangan.

1.6.2 Kontribusi Praktis

Penelitian disini dimaksudkan bisa memberi utilitas atau kegunaan guna instansi pemerintah terkait dan instansi pemerintah lainnya guna meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui kecermatan variabel-variabel terkait.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Tujuan hal ini ialah untuk memudahkan perumusan dan membelajarkan bagian-bagian dari keseluruhan rangkaian penulisan pada penelitian.

BAB 1: PENDAHULUAN

Dari bab pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Sementara itu, latar belakang

menjelaskan alasan dari peneliti yang mengakibatkan minat penulis guna memahami permasalahan dalam penelitian. Rumusan masalah adalah konsep dari masalah yang membutuhkan penguraian dari hasil penelitian. Selanjutnya, tujuan serta manfaat dari penelitian berisi tentang hal-hal yang akan diraih sewaktu penelitian baik untuk peneliti, akademisi, dan instansi terkait. Sistematika dari penulisan berisikan pembahasan tiap bab dari skripsi ini.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Dari bagian ini memaparkan beberapa teori yang mana dijadikan kerangka dasar pemikiran dari penelitian ini. Selanjutnya, bab disini memuat penelitian terdahulu dipakai sebagai dasar dalam menentukan teori atas jawaban sementara rumusan masalah pada penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Berisi pendekatan penelitian berupa analisis deskripsi kuantitatif dimana akan digunakan peneliti dalam mengurai variabel penelitian dan mendeskripsikan definisi dari variabel penelitian yang digunakan. Bab disipun menguraikan tentang jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi beserta sampel, serta langkah-langkah yang dibuat peneliti untuk pengujian hipotesis seperti uji kualitas data berupa uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, kemudian metode analisis berupa analisis regresi linear berganda, serta pengujian hipotesis berupa uji statistik T, uji statistik F, dan uji koefisien determinasi.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memberikan ulasan terkait karakteristik umum dari subjek beserta objek penelitian yaitu 27 Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya, deskripsi karakteristik responden, hasil pembuktian hipotesis yang terdiri dari hasil uji validitas, reliabilitas normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan juga persamaan regresi linier berganda, kemudian hasil uji hipotesis seperti hasil uji statistik t, hasil uji statistik F, dan uji koefisien determinasi (R^2), serta bahasan terkait hasil dari penelitian terdahulu.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Memuat kesimpulan yakni implikasi penelitian baik implikasi secara teoritis maupun implikasi praktis, dan saran .